

DAERAH – PEMERINTAHAN DAERAH – PERANGKAT DAERAH

2016

PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG NO. 19 LD 2016/NO. 19 TLD NO. 32, SETDA KABUPATEN
MAGELANG: 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD Tipe A;
 - c. Inspektorat Tipe A;
 - d. Dinas Daerah berjumlah 18 (delapan belas);
 - e. Badan Daerah berjumlah 3 (tiga);
 - f. Kecamatan Tipe A berjumlah 21;Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan. Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
Selain UPT Dinas Daerah tersebut, terdapat:
 1. UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
 2. UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Oktober 2016.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyebutan Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, secara langsung menyesuaikan dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dilaksanakan mulai 1 Januari 2017.
 - Penjelasan 4 halaman.